

Bareskrim Polri Serahkan Tersangka Suap Bupati Nganjuk ke Kejaksaan

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri menyerahkan tujuh tersangka dan barang bukti kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ke Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Mantan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya langsung dibawa ke Nganjuk dan segera disidangkan.

"Pada 5 Juli, Kejagung menyatakan berkas penyidikan lengkap atau P-21. Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irfan Pol Argo Yuwono dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Argo mengatakan, selama proses penyidikan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 51 saksi, di antaranya 3 saksi ahli. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen.

"Selanjutnya terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa

Timur," ujarnya.

Pada Mei lalu, KPK bersama Bareskrim Polri menetapkan Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Enam tersangka lain dalam kasus ini adalah Dupriono (Camat Pace), Edie Srijato (Camat Tanjungnomo), sekaligus Plt Camat Sukomoro), Haryanto; (Camat Berbek), dan Bambang Subagio (Camat Loceret).

Kemudian, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan aju dan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Novi dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, lima tersangka yang merupakan Camat dan mantan Camat disangka Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● han

IM/FRANS



KAPOLRI TINJAU VAKSINASI MASSAL DI BANDUNG

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/7). Kapolri meminta masyarakat, pekerja termasuk perusahaan mematuhi peraturan PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli.

Kapolri Ingatkan Perusahaan dan Pekerja Supaya Mematuhi Aturan PPKM Darurat

Kapolri mengajak masyarakat berkolaborasi dengan TNI-Polri untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera tercapai.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta perusahaan dan para pekerja agar mematuhi peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku sampai 20 Juli 2021.

Kapolri Listyo mengatakan, PPKM darurat telah mengatur pembagian sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan tetap beraktivitas dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain sektor tersebut, wajib bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Tentunya kegiatan tersebut esensinya adalah mencegah interaksi masyarakat dengan menjaga mobilitas. Semoga pembagian ini dipahami ma-

nyarakat mana yang termasuk sektor esensial dan kritikal," kata Sigit, saat meninjau vaksinasi massal di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari keterangan pers, Kamis (8/7).

Selama PPKM Darurat, Listyo mengajak elemen masyarakat berkolaborasi dengan TNI-Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi Covid-19. Dengan demikian, kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera tercapai.

"Semoga akhir Juli atau Agustus vaksinasi kita bisa tembus dari 1 juta jadi 2 juta dosis per hari dan akan bertambah terus selanjutnya. Agar percepatan herd immunity dapat segera terlaksana," ucapnya. Vaksinasi di GOR Arca-

manik Bandung ini diselenggarakan oleh TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan pada 8-9 Juli 2021 dengan total target vaksinasi sebanyak 4.500 orang dari masyarakat umum yang sudah menerima dosis pertama.

Stok vaksin yang disiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 4.500 dosis Coronavac milik Pemprov dengan 235 orang vaksinator.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan, Menteri Dalam Negeri akan melakukan revisi terhadap aturan operasional sektor esensial, non-esensial dan kritikal selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Hal tersebut menyusul sejumlah usulan yang disampaikan Menteri Koordina-

tor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait operasional ketiga sektor tersebut.

Usulan sektor esensial tersebut terbagi ke dalam tiga bidang. Pertama, dalam sektor keuangan dan perbankan diusulkan hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada pelayanan pelanggan, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

Kedua, sektor teknologi informatika dan komunikasi, meliputi operator seluler data center, internet, pos dan pekerja media terkait dengan peran pentingnya dalam penyebaran informasi resmi dan benar dari pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga, untuk industri orientasi ekspor diusulkan agar pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pem-

beritahuan ekspor barang atau PEP selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Kemudian, Luhut juga mengusulkan 11 bidang masuk sektor kritikal. Pertama, bidang kesehatan. Kedua, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, bidang energi. Keempat, bidang logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Kelima, makanan dan minuman dan penunjangnya termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan. Keenam, bidang petrokimia. Ketujuh, semen dan bahan bangunan. Kedelapan, objek vital nasional. Kesembilan, proyek strategis nasional. Kesepuluh proyek konstruksi. Kesebelas, utilitas dasar seperti listrik air dan pengelolaan sampah. ● lus

21 Perusahaan Non-Esensial dan Kritikal Tak Terapkan WFH saat PPKM Darurat

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya mengatakan ada 21 perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang masih membandel tak menerapkan work from home (WFH) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Ada 21 perusahaan yang sudah naik sidik. Nanti kita cari siapa tersangkanya di antara juragan-juragan ini," kata Kapolda Metro Jaya Irfan Pol Fadil Imran di Jakarta, Kamis (8/7).

Fadil Imran mengatakan bahwa banyak karyawan perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang tetap bekerja di kantor saat PPKM Darurat karena diperintah oleh atasannya.

Untuk itu, Kapolda menegaskan akan menindak secara tegas pimpinan perusahaan sektor nonesensial dan nonkritikal yang masih mewajibkan karyawannya bekerja di kantor saat PPKM Darurat berlangsung.

"Sehingga, yang salah bukan karyawan. Yang salah adalah majikan yang tetap memerintahkan mereka masuk kerja. Oleh sebab itu kemarin kita tidak proses. Kami catat nama perusahaannya, alamatnya, hari ini kami datangi," ujar Fadil Imran.

Kapolda pun mengimbau kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk mendukung PPKM Darurat dengan mengurangi mobilitas.

"Kami mengimbau agar masyarakat mengurangi mobilitas. Stay safe at home, ini kuncinya. Kalau kita di rumah saja, maka,

pandemi ini bisa cepat berlalu," ujar Kapolda.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus sebelumnya mengatakan, polisi mengencarkan patroli pada perusahaan sektor non-esensial dan nonkritikal yang masih beroperasi saat PPKM Darurat. Apalagi, polisi mendapatkan laporan masyarakat yang masih banyak perusahaan bandel.

"Kita terus melakukan upaya patroli pada perusahaan nonesensial dan nonkritikal sesuai kebijakan pemerintah, diarahkan 100 persen diliburkan dan kerja di rumah saja," ujar Yusri pada wartawan, Rabu (7/7) kemarin.

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat itu dibuat untuk dipatuhi demi keselamatan warga yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Semua itu dilakukan untuk memutus mata rantai Covid-19 yang semakin tinggi penyebarannya.

"Kami menerima laporan dari masyarakat tentang perusahaan yang masih bandel, akan kami tindak dan laporan dari masyarakat ini yang kami butuhkan untuk bisa membantu kami," tuturnya.

Dia menambahkan, masyarakat diminta untuk mengerti tentang bahayanya Covid-19 di Jakarta ini dan tak melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi, jumlah tempat tidur di wisma dan rumah sakit sudah banyak yang penuh karena terisi pasien Covid-19, angka penyebaran yang tinggi hingga angka kematian yang tinggi saat ini. ● lus

KKB Tembaki Acara Bakar Batu di Ilaga Papua yang Dihadiri Bupati, Dandim dan Kapolres

JAYAPURA (IM) - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melepaskan tembakan ke arah penyelenggaraan acara bakar batu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kelompok tersebut menembaki peserta dari kejauhan. Penembakan itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIT, Kamis (8/7).

Komandan Korem 173/PVB, Brigadir Jenderal TNI Iwan Setiawan, mengakui sempat terjadi kontak senjata di Ilaga yang diawali gangguan kelompok bersenjata saat penyelenggaraan acara bakar batu.

Acara bakar batu itu dihadiri bupati, Komandan Kodim, Kepala Polres, serta pejabat dan warga di wilayah itu. Gangguan

itu kemudian direspons anggota TNI-Polri yang memang bersiaga dan tidak ada korban jiwa.

"Acara bakar batu itu sendiri dilakukan sebagai bentuk rasa syukur mulai pulihnya kondisi keamanan di wilayah itu," kata Setiawan yang dihubungi dari Jayapura.

Dari laporan yang diterima, anggota TNI-Polri mengejar mereka dan menyisir lokasi. Namun dia belum bisa memastikan kelompok mana yang mengganggu acara bakar batu.

"Ada kemungkinan yang mengganggu adalah kelompok Lekagak Telengen atau kelompok Teri Mayu yang berada di sekitar muara," katanya. ● lus



OPERASI PENYEKATAN PPKM DARURAT DI DENPASAR

Anggota Polisi meminta warga untuk menunjukkan surat keterangan kerja saat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pos Teuku Umar Barat - Gunung Salak, Denpasar, Bali, Kamis (8/7). Operasi penyekatan yang digelar di 7 titik pintu masuk Kota Denpasar tersebut untuk membatasi mobilitas orang dan mencegah penyebaran varian baru COVID-19 menyusul meningkatnya kasus positif COVID-19 di ibu kota Provinsi Bali itu.

Polda Metro Ungkap 3 Kelompok Penimbun Obat-obatan Terkait Covid-19

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya, Irfan Pol Fadil Imran menyatakan, telah membongkar tiga kelompok dan menangkap pelaku penimbun obat-obatan maupun alat kesehatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Untuk penimbun obat-obatan terkait dengan Covid-19, kami sudah tangkap 3 kelompok. Baik itu (menimbun) Avigan, Ivermectin, dan tabung oksigen. Sekarang sedang diproses," kata Fadil, Kamis (8/7).

Fadil menegaskan, pihaknya terus memburu pelaku lainnya. Ia mengatakan, tim terus memantau mulai pabrik, distributor, sampai ke toko-toko obat, untuk tidak ada kebocoran.

Polisi juga mengawal pendistribusian obat agar stoknya tetap tersedia. Pengawasan itu juga dilakukan agar harga obat tak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan. Sebelumnya, Polisi sempat menutup sebuah toko di kawasan Matraman, Jakarta Timur, lantaran menjual Ivermectin di atas HET. Pemilik toko bernisial R juga sudah diamankan polisi.

"Ada yang mencoba bermain nakal. Harga ini ditekan sekitar Rp475.000 per satu kotak (Ivermectin)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat konferensi pers Selasa (6/7) lalu.

Menurut Yusri, HET Ivermectin sekitar Rp75.000 satu kotak. Yusri menyatakan, masih ada pihak lain yang melakukan praktik serupa. Bahkan, ada pihak yang menjual Ivermectin seharga Rp700.000 di internet. "Ini akan kami lakukan penindakan, kami akan tindak tegas. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain!" tegas Yusri.

Orang yang terbukti melakukan praktik tersebut akan dijerat dengan Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keamanan Kesehatan. Pihak yang

berhak menjual Ivermectin adalah apotek yang mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Klinis Kefarmasian (STRITKK).

Yusri menyatakan, Ivermectin kini menjadi salah satu barang yang langka di pasaran. Selain karena ada pihak yang memainkan harga, juga karena panic buying masyarakat. Ivermectin dianggap bisa menahan penularan Covid-19.

Terancam 6 Tahun Penjara

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan sebelumnya mengatakan penimbun alat-alat kesehatan termasuk tabung oksigen bisa dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun.

Hal itu disampaikan Ramadhan dalam Dialog Daring Selasa (6/7).

"Bisa diancam dengan ancaman enam tahun penjara dan hukuman denda Rp2 miliar," ujar Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam Dialog Daring bertajuk "Taat PPKM Darurat Harga Mati," seperti disiarkan di Channel Youtube FMB9ID IKP, Selasa (6/7).

Tak hanya itu, penimbun alat-alat kesehatan juga bisa dikenakan pasal berlapis. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-undang (UU) Tentang Perdagangan, UU Tentang Kesehatan dan UU Tentang Perlindungan Konsumen. Saat ini, kata dia, Polri tengah melakukan pemantauan aktivitas jual beli online dan langsung di pasar untuk obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama masa pandemi Covid-19.

Polri juga akan memberikan tindakan tegas terhadap mereka yang menumpuk dan memainkan harga obat-obatan Covid-19 dan alat kesehatan lainnya.

"Tentu ada pasal-pasal yang akan menjerat para pelaku yang melakukan penjualan di atas rata-rata atau harga eceran tertinggi yaitu Undang-undang Perdagangan maupun Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen," tutur Ramadhan. ● lus

Mayat Wanita Dalam Box di Bogor Bertato Tinker Bell dan Tulisan RIRI

BOGOR (IM) - Polisi masih berupaya mengetahui identitas mayat wanita dalam box kontainer yang ditemukan di Kota Bogor. Untuk membantu penyelidikan, polisi sudah menyebarkan ciri-ciri korban kepada masyarakat.

"Tindak lanjut penyelidikan, penyidik konsentrasi untuk menentukan siapa identitas jenazah meninggal ini. Dan hari ini kita akan sebar semua ciri-ciri jenazah tersebut bentuk sebaran atau flyer untuk sebarluaskan, kata Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdly, dalam keterangannya, Kamis (8/7).

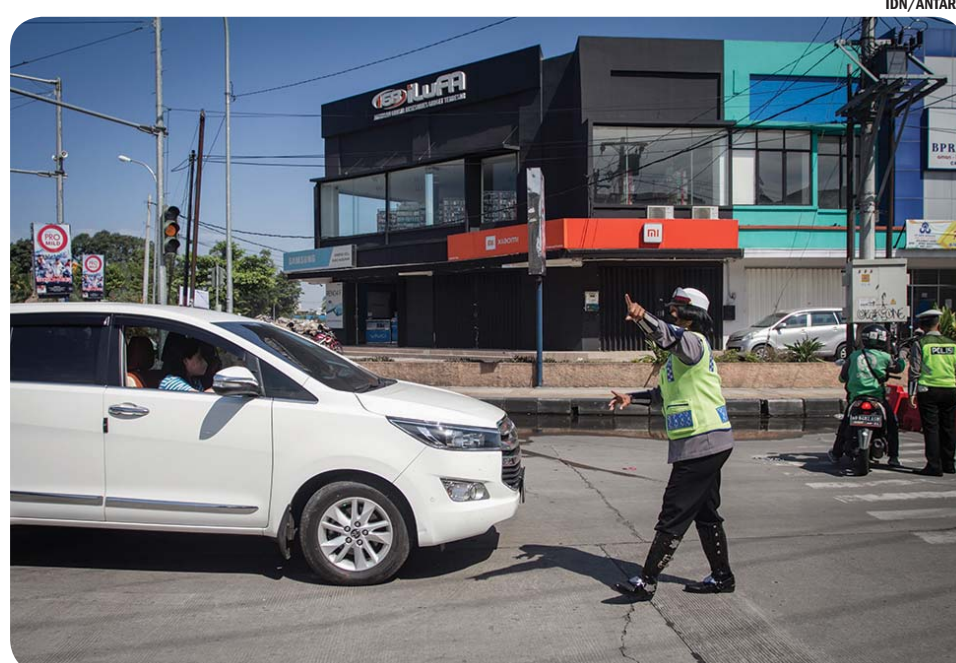
Adapun ciri-cirinya memiliki tato tinker bell pada punggung sisi kiri, dan terdapat tulisan "RIRI". Kemudian, spir yang membawa mobil tersebut hingga pemilik mobil yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Korea.

Mayat wanita dalam box kontainer ditemukan di salah satu bengkel di Jalan Kan'an, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Selasa (6/7). Menurut karyawan bengkel, mobil tersebut sudah berada sekitar 5 hari. Saat ditemukan, kondisinya mengeluarkan bau yang menyengat.

"Jadi sampai di bengkel (mobil) udah sekitar 5 hari. Diperkirakan perempuan karena tidak bisa dilihat secara kasat mata. Sejauh ini kami lihat masih lengkap. Tapi nanti kita lihat hasil autopsi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo, kepala wartawan di lokasi, Selasa (6/7).

Saat ini, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Mayat wanita itu dibawa petugas ke rumah sakit.

"Kami masih penyelidikan terkait identitas atau pengumpulan barang bukti. Baik kendaraan maupun korban dam sebagainya," kata Susatyo. ● lus



PENUTUPAN AKSES JALAN DI KOTA SOLO

Anggota Polisi meminta pengemudi mobil untuk memutar balik saat Pemberlakuan Penutupan Akses Jalan di jalan Pierre Tendeau, Nusukan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/7). Sebanyak enam ruas jalan protokol di Kota Solo ditutup sementara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengurangi mobilitas warga demi menekan penyebaran COVID-19.